



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMILYA NURJANI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI GEOGRAFI LINGKUNGAN
3. NHK : 947716

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.390.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 431 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 75 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 129 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 162.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 244.371.369



F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.846.871.369
III. HUTANG	Rp.	1.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.845.871.369

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.